

INTEGRITAS MASYARAKAT PLURALISME JALAN TENGAH DWIPOLAR DÂR AL-HARB DAN DÂR AL- ISLÂM : STUDI GEOPOLITIK ISLAM

Oleh : M. Sidi Ritaudin*

Abstract

The theme of this article is dâr al-harb vis a vis dâr al-Islâm. These issues are usually connected to movement of terorism. At the doctrinal level, thinker Muslims are the followers of those paradigm. So, term jihâd (holy war) in Islamic political was important soul. The interaction of pluralism society in International gathering had bring human being to global society. Throughout the political Islamic thought is evident disposed to those dwiupolar paradigm. Straightaway the question remarks it's relevance to political contemporary map. According to global society, the map of geopolitic, therefore, it is a challenge for tolerant and pluralism perspective.

Kata Kunci : Dwipolar, *dâr al-harb*, *dâr al-Islâm*, geopolitik.

Pendahuluan

Pemetaan geopolitik *dâr al-harb vis a vis dâr al-Islâm* dalam konteks pemikiran kontemporer nampaknya perlu ditinjau ulang. Paling tidak, alasan mendasar adalah tidakditemukannya *nash* al-Qur'ân maupun Sunnah yang membicarakan kedua konsep tersebut. Oleh karena itu pula, konsep ini ditengarai tidak memiliki hubungan dengan sumber pokok Islam, yang prinsip-prinsipnya ditujukan untuk seluruh alam (*lil- 'âlamîn*), sepanjang waktu dan melampaui batasan geografis.

Islam tumbuh dan berkembang, baik melalui dakwah maupun pertumbuhan penduduk yang menyebar melaui proses migrasi, perdagangan, pendidikan dan lain sebagainya (disebut juga sebagai mobilitas penduduk). Mobilitas penduduk yaitu perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Mobilitas dibedakan atas dua, yaitu mobilitas nonpermanen (tidak tetap) dan mobilitas permanen (tetap). Apabila perpindahan bertujuan untuk

menetap di daerah tujuan maka disebut migrasi, umpamanya urbanisasi, imigrasi, emigrasi dan remigrasi.¹

Mobilitas penduduk ini merupakan relitas kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jutaan orang Muslim hidup di Eropa, mayoritasnya mendapatkan kebebasan beribadah, mengorganisasi diri, dan bertindak dalam batas-batas beragam konstitusi yang juga melindungi hak-hak mereka. Dalam konteks ini, apakah konsep-konsep lama tentang dwipolar *dâr al-harb* dan *dâr al-Islâm* masih relevan dengan situasi tersebut ? Apakah antitesis, fenomena dua spektrum, sebutan *dâr al-harb* dan *dâr al-Islâm* masih sesuai dengan kondisi dunia yang sudah semakin sempit; terbukanya era globalisasi dengan kemunculan teknologi komunikasi dan informasi seperti sekarang ini di mana konfigurasi geopolitik yang sangat kompleks dan daerah kekuasaan serta pengaruh dengan multi dimensi ?

Realitas politik internasional tidak menampakkan posisi menguntungkan bagi kehidupan Muslim² dengan prinsip *rahmatan lil-‘âlamîn* jika masih mempertahankan prinsip paradigma lama tersebut. Sebab persoalan mendasar adalah apakah Muslim di Eropa (Barat, termasuk Australia) harus menganggap dirinya berada di tanah asing, sebagai orang-orang asing, yang berkewajiban hanya melindungi diri mereka di lingkungan yang agresif, atau sebaliknya, apakah mereka harus menjadi bagian dari negara ini, menganggap negara sendiri, sebagai warga negara sejati yang, dalam lingkup hukum, harus bertindak sebaik mungkin dengan memperlakukan masyarakatnya secara lebih adil dan bertenggang rasa, menetapkan nilai-nilai

¹Lihat, Sri Hayati dan Ahmad Yani, *Geografi Politik*, (Bandung : Refika Aditama, 2007), h. 86.

²Ada sementara pengamat mengatakan bahwa agama dapat menyesuaikan diri dengan problema kemodernan. Bahkan ada yang telah membuktikan bahwa hukum internasional, pada dasarnya, tidak asing dari Islam. Lihat, Mohammad T. Ghunaimi, *The Muslim Conception of International Law and the Western Approach*, (La Haye : Nijhoff, 1968), XV, h. 228.

yang bersesuaian dengan nilai yang dituntut oleh agama, hati nurani dan kewarganegaraan mereka.³

Paradoksalitas paradigm

Terminologi *dâr al-Islâm* diterjemahkan, tentu saja, tidak berdasarkan pengertian etimologi, karena kata *dâr*, jika diterjemahkan secara harfiah berarti rumah, tempat atau daerah. Istilah-istilah tersebut walaupun sesuai dengan terjemahan harfiah *dâr*, tetapi tidak memberikan arti politik yang tepat. Oleh karena itu *dâr al-Islâm* diartikan sebagai wilayah atau kawasan Islam. Terhadap kawasan/ wilayah Islam ini terdapat kawasan/wilayah perang, yang diterjemahkan dari *dâr al-harb*. Pembagian geopolitik ini ke dalam dua wilayah seperti di atas, menurut Boisard merupakan doktrin klasik.⁴ Sebagai doktrin klasik dapat ditegaskan dengan pernyataan Nurcholish Madjid berikut ini : "Puncak dari 'sumerisme' itu, dalam artinya sebagai peradaban dunia dalam bentuk masyarakat berkota (*cited society*) dengan daerah ekonomi agraris dengan pengembangan serta peningkatan optimal aspek kemanusiaannya ialah *dâr al-Islâm* yang berhasil mendominasi ummat manusia selama paling sedikitnya delapan abad". Sementara Anthoni Black mengungkap tiga abad Islam pertama⁵ Tentu saja yang dimaksud adalah abad kejayaan Islam yang dimulai dari perkembangan Islam awal masa Nabi dan Khulafâ al-Râyidîn.

Dâr al-Islâm, menurut pengertian yang diberikan oleh Hodgson adalah negeri-negeri di bawah kekuasaan Muslim; kemudian negeri mana saja di mana lembaga-lembaga Muslim dipertahankan, apakah di bawah kekuasaan Muslim atau tidak. Istilah ini merupakan kebalikan dari *Dâr al-harb*, yaitu negeri-

³Pemaparan secara komprehensif dapat dibaca pada, Tariq Ramadan, *Teologi Dialog Islam-Barat Pergumulan Muslim Eropa*, (Bandung : Penerbit Mizan, 2002), h. 139.

⁴Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, (terjemahan M. Rasjidi), (Jakarta : Bulan Bintang, 1980), h. 232.

⁵Lihat, Nurcholish Madjid, (ed.), *Khazanah Intelektual Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1985), h. 52. Anthoni Black, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, (Jakarta : Serambi, 2006), h. 55 dan 107.

negri di bawah kekuasaan non-Muslim.⁶ Pengertian ini agaknya tidak cukup untuk penjelasan terhadap perkembangan modern dunia Islam, terutama dari perspektif geopolitik.

Dâr al-Islâm (wilayah Islam), disebut juga *dâr al-'adl* (wilayah keadilan), atau *dâr al-Tauhîd* (wilayah orang yang beriman kepada Ke-Esaan Tuhan). Wilayah Islam tentu wilayah kaum Muslimin, tempat sistem pemerintahan Islam diberlakukan (meskipun kaum non-Muslim menjajahnya). Dalam pengertian ini terlihat perbedaan antara orang Muslim yang keberadaan dan jumlahnya benar-benar mengungkapkan ide tentang “kepemilikan wilayah” (*al-milkîyyat lî al-muslimîn*) dan para pemimpin yang bisa saja non-Muslim.⁷ Ulama mazhab Hanafi memberi tekanan pada situasi kaum Muslim yang sangat spesifik : keamanan mereka. Jadi, menurut mereka, bukti bahwa kaum Muslim berada dalam *dâr al-Islâm* adalah ketika kaum Muslim aman dan merasa tidak takut karena agama mereka. Bagi mazhab ini, murni soal keamanan dan perlindungan, bukan soal Islam dan kufur.

Dâr al-harb, (wilayah perang), disebut juga *dâr al-syirk* (wilayah politeisme) lawan dari *dâr al-tauhîd*. Pada umumnya ulama bersepakat bahwa suatu negara menjadi *dâr al-harb* jika sistem pemerintahan dan pemerintahannya tidak Islami. Akan tetapi, sebutan ini bukan bergantung pada jenis penduduknya (yang mayoritas bisa saja Muslim), melainkan hukum dan sistem politiknya. Menurut mazhab Hanafi, berbeda dengan *dâr al-Islâm*. *dâr al-harb* adalah negara tempat kaum Muslimin tidak dilindungi, tidak aman, tidak damai. Eksistensi *dâr al-harb* tidak bergantung pada keadaan perang antara dua faksi yang saling berlawanan.⁸

Tariq Ramadan merespon pendapat di atas dengan mengatakan bahwa mayoritas ulama bersikeras pada kepemilikan wilayah dan aplikasi sistem legal Islam sebagai indeks untuk

⁶Marshall G. S. Hodgson, *The Venture of Islam* (Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia Masa Klasik Islam) Buku Kedua, terjemahan Mulyadhi Kartanegara, (Jakarta : Paramadina, 2002), h. 362.

⁷Lihat, Syaikh Mannâ' al-Qaththân, *Iqâmah al-Muslîm fî Balad Ghair Islâmî* (Perkampungan Muslim di Negara Non-Muslim), (Paris : 1993).

⁸Lihat, Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, (terjemahan H.M. Rasjidi), (Jakarta : Bulan Bintang, 1980), h. 233.

menetapkan eksistensi *dâr al-Islâm*. Sedangkan untuk menetapkan *dâr al-harb* indeks model pemerintahan dan sistem legal dianggap lebih relevan. Tekanan diberikan kepada penduduk menurut pendapat yang pertama, sementara pendapat yang kedua lebih menekankan pada pemerintahan. Abû al-Zarqâ dan Yusuf al-Qardâwî berpendapat bahwa negara-negara Islam yang di dalamnya masih terjadi penindasan, ketidakadilan, dan kediktatoran merajalela masih bisa dianggap sebagai *dâr al-Islâm* alasan masih memungkinkan terjadinya reformasi. Berseberangan dengan pendapat ini, adalah parameter yang didasarkan pada keselamatan dan keamanan.⁹ Kaum Muslim terkadang lebih aman di Barat--berkenaan dengan kebebasan mengamalkan agamanya-- daripada di negara-negara Islam. Jadi, penyebutan *dâr al-Islâm* dapat diaplikasikan pada semua negara Barat, sedangkan mayoritas negara Islam, yang majoritas penduduknya Muslim, tidak bisa dikatakan demikian. Namun, sebagai catatan harus berhati-hati dengan kesimpulan ini, sebab kecuali parameter keamanan, negara-negara Barat tidak Islami.¹⁰

Dwipolar geopolitik Islam

Pembagian atas dua bagian (kelompok orang yang berkepentingan) yang berlawanan (dwipolar), yaitu *dâr al-harb* dan *dâr al-Islâm*, tentu saja masih dipertanyakan keabsahannya. Sebelumnya, mungkin ada relevansinya dikemukakan terlebih dahulu di sini pendapat Frithjof Schuon bahwa “Islam menyebar ke seluruh dunia bagaikan kilat berkat substansinya, dan penyebarannya terhenti dikarenakan bentuknya”.¹¹ Dua terminologi yang harus digaris bawahi dari pernyataan Schuon ini, yaitu substansi dan bentuk. Dalam konteks *dâr al-Islâm*, dapat dikonotasikan pada substansi, sedangkan *dâr al-harb* adalah

⁹Paradoksalitas antara paradigma *dâr al-Islâm* dengan *dâr al-harb* lihat juga, Nurcholish Madjid, (ed.), *Khazanah Intelektual Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1985), h. 13. *Dâr al-Islâm* dalam konteks kemodernan menurut Nurcholish Madjid dapat dipandang sebagai kelanjutan langsungnya masyarakat berkota (*cited society*), terutama jika dilihat dari segi pola kehidupan sosial-ekonominya. Lihat, *Ibid.*, h. 54.

¹⁰Tariq Ramadan, *Teologi Dialog Islam-Barat Pergumulan Muslim Eropa*, (Bandung : Penerbit Mizan, 2002), h. 143-144..

¹¹Frithjof Schuon, *Islam dan Filsafat Perenial*, (Bandung : Mizan, 1993), h. 25.

bentuk. Ketika Islam diberi bentuk yang nisbi, seperti isme-isme yang merupakan buah pikiran manusia, maka terjadilah *debatabel* bahkan perseteruan yang pada ujungnya menyebabkan kejatuhan dan keterpurukan. Namun demikian istilah ini dipergunakan untuk memudahkan dalam melihat Islam dalam potret geopolitik.¹² *Dâr al-harb* dan *dâr al-Islâm* merupakan batas wilayah yang tidak didasarkan pada batas-batas wilayah sebagaimana batas-batas negara, tetapi batasanya adalah wilayah ideologis, yaitu ideologi Islam dan non Islam.

Islam, baik dalam Wahyu maupun Sunnah, tidak mengenalkan kedua istilah tersebut, namun demikian, secara stereotip kalangan Muslim tidak memandangnya sebagai suatu hal yang asing dalam istilah pemikiran politik Islam. Karena tidak memiliki dasar normatif yang valid, dan ditengarai adanya istilah *dâr al-harb* yang dihadapkan dengan *dâr al-Islâm* telah menyulut semangat jihad dan berkembangnya aliran kekerasan dan teror dalam Islam, tentu saja hal ini patut dicurigai dan perlu dikaji ulang, sebab merugikan Islam dan kalangan Muslim itu sendiri.

Jihad adalah istilah teknis dalam dunia Muslim berasal dari bahasa Arab dan memiliki sejarah perjuangan panjang, dan umumnya berkaitan dengan kawasan-kawasan Muslim Afrika dan Asia yang lebih tua. Banyak kalangan menilai bahwa kata jihad mengandung arti kekerasan. Kata ini paling sering diterjemahkan oleh kaum orinetalis dengan “perang suci”, yaitu perang yang dilancarkan terhadap non-Muslim, semacam kebalikan dari Perang Salib. Sejauh ini, transformasi jihad menjadi ideologi modern berjalan tidak mulus, karena perhatian yang kurang pada jihad di beberapa kalangan. Sementara jihad secara retorik mungkin masih memiliki daya tarik di Afrika Utara, Timur Tengah atau bahkan dalam kaitan Asia Selatan, sebaliknya bagi warga Asia Tenggara, dan khususnya bagi kaum Muslim Melayu, jihad (yang dipahami sebagai imbauan untuk melakukan perjuangan bersenjata) sudah dilampaui oleh kebutuhan meletakkan Islam dalam konteks ekonomi Internasional. Jihad

¹²Geopolitik salah satu cabang ilmu pengetahuan yang membahas tentang pengaruh faktor geografi terhadap ketatanegaraan; atau kebijaksanaan negara atau bangsa sesuai dengan posisi geografisnya. Lihat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia edisi kedua*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), h. 311.

telah memperoleh makna perjuangan keadilan sosial dalam lingkungan yang semakin luas, yang juga mencakup partisipasi ekonomi serta kemakmuran bagi kaum Muslim.

Argumentasi di atas diajukan dan merupakan dasar perjuangan kaum Muslim menegakkan syari'ah Islam dalam negara. Semua golongan pemikir garis keras berpandangan demikian, seperti Sayyid Quthb, Abul A'la Maududi, serta kelompok-kelompok pergerakan Islam, seperti Hizbut Tahrir, Ikhwan al-Muslimin, Lasykar Jihad, Jama'ah Islam, Majelis Mujahidin Indonesia dan lain sebagainya.

Antagonisme dwipolar

Dua entitas *dâr al-harb* dan *dâr al-Islâm* memiliki signifikansi pada masa-masa tiga abad Islam pertama¹³ yang dimunculkan dalam wacana pemikiran Islam klasik oleh para ulama, agar orang Muslim memiliki gambaran yang jelas tentang realitas geopolitik pada zaman mereka. Terminologi polarisasi, dalam arti, pembagian atas dua bagian (kelompok orang yang berkepentingan) yang berlawanan (dwipolar *dâr al-harb* dan *dâr al-Islâm*). Gagasan ini muncul di abad modern diusung oleh kelompok pemikir Islam fondamentalis skipturalis seperti Sayyid Quthb.

Pemikiran sentral Sayyid Quthb adalah adanya jurang dualisme Manichean¹⁴ : di satu sisi ada keadilan, aturan sesuai dengan perintah al-Qur'an dan Islam, yang merupakan implementasi konsep *hakimiyyah*, kekuasaan Ilahi. Di sisi lain ada *jahiliyyah* atau yang menentang *hakimiyyah*, berlanjutnya kebodohan, pemutarbalikan, serta kekhilafan yang disengaja. Termasuk dalam *jahiliyyah* adalah penggunaan semua "isme", apakah itu komunisme, kapitalisme, saintisme atau humanisme,

¹³Antony Black menyebut istilah *dâr al-Islâm*, pada pembahasan Masa Abbasiyah dan kebangkitan kembali Persia, hal ini menunjukkan bahwa terminologi ini timbul dan berkembang pada masa kejayaan Islam, lihat Anthoni Black, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, (Jakarta : Serambi, 2006), h. 55 dan 107.

¹⁴Manicheanism, adalah sebuah sekte dari jenis gnostik yang didirikan pada abd ke-3 di bawah kekuasaan orang-orang Sasani. Orang-orang sasani ini menganut agama Mani. Lihat, Marshall G. S. Hodgson, *The Venture of Islam* (Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia Masa Klasik Islam), terjemahan Mulyadhi Kartanegara, (Jakarta : Paramadina, 2002), h. 74.

selain Tuhan. Nasionalisme pun dengan demikian menjadi salah satu nir-Tuhan-isme (*Godlessness*).¹⁵

Sayyid Quthb dengan lantang mengingatkan bahwa kesetiaan pada nasionalisme, seperti halnya pada isme mana pun, adalah salah. Hal ini merupakan fenomena *jahiliyyah* bagi Quthb. Mengikuti semangat Islam sejati, bila *hakimiyyah* berlaku, menurut Quthb, “nasionalisme akan diakui sebagai kepercayaan, Tanah Air sebagai *dâr al-Islâm*, penguasanya adalah Tuhan, dan konstitusinya adalah al-Qur'an.¹⁶ Kekuatan Quthb yang menganjurkan Islam sebagai politik keagamaan mereduksi Islam menjadi program protes satu-satunya melawan kekuatan-kekuatan dominan sistem dunia modern. Begitu pun para pengikut pemikiran Quthb dan sejenisnya di Indonesia, protes-protes yang dilancarkan dengan cara kekerasan seperti yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia umpamanya, jelas sekali mereduksi Islam itu sendiri. Karena kekuatan dominan NKRI adalah kontrak politik yang harus dijalankan oleh seluruh rakyat Indonesia yang telah disepakati oleh siapa pun yang tinggal di dalamnya.

Masyarakat Islam yang hidup dalam komunitas *dâr al-Islâm*, menetapkan syari'ah sebagai otoritas sentral, dan prinsip-prinsip Islam harus diterapkan pada semua aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Hasilnya adalah masyarakat Islam yang bukan sosialis maupun kapitalis. Masyarakat Islam ideal ini harus dicapai dengan jihad atau perang suci. Cara ini akan menghancurkan semua kekuatan musuh-musuh Islam, yaitu kekuatan *jahiliyyah* (yang berada pada posisi *dâr al-harb*).¹⁷

Dampak pemikiran dwipolar

Pengaruh kuat dari paradigma dwipolar dengan terminologi *dâr al-harb* dan *dâr al-Islâm*, mendatangkan akibat yang sangat dahsyat, baik segi positif maupun segi negatifnya. Di kalangan umat Islam di mana saja terdapat perasaan tidak senang

¹⁵ Penjelasan Lawrence ini dikutip dari buku Sayyid Quthb, “Ma’alim fi al-Thariq” (Cairo : Dar ash-Shuruq, 1964), lihat, Bruce B. Lawrence, *Islam Tidak Tunggal Melepaskan Islam dari Kekerasan*, Jakarta : Serambi, 2004) h. 42. Sayyid Quthb, *Ma’alim fith-Thariq*, (Kairo : Rar Ash-Shuruq, 1964), h. 26.

¹⁶ Sayyid Quthb, *Milestones*, (Cedar Rapids, Iwoa : Unity Publishing, t.th), h. 126.

¹⁷ Lihat analisis Ian Adams, *Ideologi Politik Mutakhir Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depannya*, (Yogyakarta : Penerbit Qalam, 2004), h. 434.

tertentu terhadap non Muslim, oleh berbagai alasan dan latar belakang. Namun di Barat dikenal sebagai “anti Semitisme” yang sempat memuncak menjadi *Genocide* dan *Holocaust* oleh Nazi Jerman, perasaan kurang positif Muslim terhadap non Muslim tidak ada artinya. Bahkan masih dalam batas-batas yang wajar dan manusiawi, seperti halnya setiap perasaan yang ada pada suatu kelompok terhadap kelompok lain. Prasangka dan stereotip negatif adalah bagian dari kenyataan hubungan antar kelompok. Namun tidak semua kelompok membenarkan adanya prasangka dan stereotip kepada kelompok lainnya, dan banyak dari mereka yang berkomitmen untuk memberantasnya.¹⁸

Kaum Muslim, dalam hubungannya dengan agama-agama lain, khususnya Yahudi dan Kristen, data dikategorikan sebagai kelompok yang berkomitmen untuk memberantas stereotip negatif. Hal ini disandarkan pada sikap Nabi Saw setelah Perjanjian Hudaibiyyah (*Sulh al-Hudaibiyyah*), yang pada prinsipnya saling berkomitmen dalam perbedaan, saling menghargai dan menghormati satu sama lainnya. Namun demikian, dalam perjalanan sejarah terdapat kasus-kasus yang dapat diungkap, emngapa para ulama klasik mendukung konsep dwipolar tersebut. Di samping adanya gangguan kesejarahan seperti imprialisme Barat dan Zionisme Yahudi pada zaman modern atau pra modern; ada dua kasus yang terjadi pada saat Nabi Saw mengirim dilegasi ke masyarakat di negara-negara tetangga yang sama sekali tidak mengenal Islam, atau yang pemimpinnya tidak mengetahui realitas kemunculan agama baru dan yang mendasarkan hukumnya pada perundang-undangan yang tidak adil.

Kasus pertama adalah ketika Nabi Saw mengutus Harits ibn Umair ke Romawi, ia dibunuh oleh Amr al-Ghassani, salah satu dari menteri kekaisaran Romawi, sehingga menyebabkan terjadinya peperangan, yang jelas bukan tujuan dari deligasi tersebut maupun kaidah untuk hubungan dengan bangsa-bangsa tetangga. Kasus kedua terjadi peperangan melawan Persia pada waktu pemimpin mereka merobek-robek al-Qur'an di depan

¹⁸Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, (Jakarta : Paramadina, 2000), h. xc.

utusan Nabi Saw dan memerintahkan beberapa tentara untuk pergi dan membawa “Si Muhammad hidup-hidup” kepadanya. Kedua reaksi ini dipahami sebagai deklarasi perang. Akan tetapi, pada mayoritas kasus lainnya, pesan Nabi disampaikan tanpa perang atau ketegangan sedikit pun.

Hubungan politik antara Muslim dan non Muslim, setelah mengkaji tindakan Nabi Saw, secara fundamental, harus dipahami bahwa kaum Muslim berpegang pada prinsip perdamaian, bukan peperangan. Dalam konteks itu pula, Nabi Saw tidak memiliki kepentingan pribadi dalam menyampaikan pesan ke umat dan tidak mengambil alih kekuasaan. Realitas kesejarahan memperlihatkan bahwa Nabi Saw selalu memerangi para pemimpin disebabkan pembunuhan, pengkhianatan, atau ketidakadilan yang mereka lakukan, dan Nabi saw tidak pernah memerangi masyarakat hanya karena mereka menolak Islam.¹⁹

Tidak dapat dipungkiri bahwa term *al-Harb* (perang) konotasinya adalah pembunuhan. Secara konsepsional, dalam pandangan Islam perang itu tidak identik dengan pembunuhan. Suatu kesepakatan universal menunjukkan bahwa sekali suatu hidup terwujud maka ia harus dilindungi dan dihormati. Ajaran agama melarang pembunuhan, serta pandangan bahwa pembunuhan adalah kejahatan besar, tidak bisa lain daripada harus diinterpretasikan bahwa menurut agama, hidup itu secara intrinsik adalah berharga dan harus dilindungi. Demikian pula dalam bentuknya yang lebih positif, perintah agama untuk membantu dan menolong sesama manusia, dan pandangan bahwa tindakan itu sebagai kebajikan besar.

Apa pun alasan dan latar belakangnya membunuh sesama manusia merupakan hal yang dikutuk oleh agama. Maka jika ada seorang ”teroris” yang berpandangan bahwa ”menjadi pengantin bom” merupakan jalan pintas menuju sorga, itu adalah ajaran yang sesat. Doktrin politik yang tidak berdasar. Karena dalam al-Qur’ân ditegaskan :

”Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain[Yakni: membunuh orang bukan karena qishaash.], atau bukan karena

¹⁹Tariq Ramadan, *Teologi Dialog Islam-Barat Pergumulan Muslim Eropa*, (Bandung : Penerbit Mizan, 2002), h. 141.

membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya[Hukum ini bukanlah mengenai Bani Israil saja, tetapi juga mengenai manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah sebagai membunuh manusia seluruhnya, karena orang seorang itu adalah anggota masyarakat dan karena membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya]. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu[Ialah: sesudah kedatangan Rasul membawa keterangan yang nyata.] sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.” (Q.S. al-Maidah/5 : 32).

Perhatikan dengan cermat ayat di atas, betapa konsepsi Islam tentang kemanusiaan begitu agung dan mulia. Maka jika ajaran Islam diamalkan dengan benar, kehidupan di muka bumi akan damai dan tenram, karena Islam itu merupakan rahmat bagi sekalian alam. Cukup dengan ayat di atas dapat ditegaskan bahwa ”terorisme” dalam arti tindakan kekerasan, perang dan pemboman dengan mengakibatkan tragedi kemanusiaan, seperti kasus di menara kembar Amerika Serikat, Bom Bali I dan II, bom JW Mariot I dan II dan bom Ritz Carlton, yang kesemuanya telah merenggut ratusan bahkan ribuan nyawa orang-orang yang tidak berdosa; ini jelas-jelas tidak benar kalau bersumber dari ajaran Islam.

Nilai-nilai ajaran Islam diberimakna universal, yaitu iman dan keadilan dan mempertanggungjawabkan tindakan sosial dan politiknya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, tidak relevan mendikhotomi, atas dasar kebencian, ini golongan kami dan ini golongan mereka. Ini orang Barat dan yang ini orang Timur karenanya harus diperangi, harus dibom disebabkan beda akidah, dan sebagainya. Hal ini ditegaskan dalam ayat berikut ini :

Ayat 9. menyebutkan : ”dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada

perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”.

Ayat 10. menyebutkan : ”orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

Ayat 11. menyebutkan : ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri[Jangan mencela dirimu sendiri Maksudnya ialah mencela antara sesama mukmin karana orang-orang mukmin seperti satu tubuh.] dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman[Panggilan yang buruk ialah gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari, seperti panggilan kepada orang yang sudah beriman, dengan panggilan seperti: Hai fasik, Hai kafir dan sebagainya.] dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.”

Ayat 12. menyebutkan : ”Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”

Ayat 13. menyebutkan : ”Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi

Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”(Q.S al-Hujurat/49 ; 9-13).

Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa yang paling penting bukanlah identitas etnis, suku, ras atau jenis kelamin, melainkan ketakwaan. Nilai takwa dapat diperoleh jika dapat mewujudkan sikap toleran, saling menghargai antar sesama manusia. Tidak dibenarkan saling mencemooh, apa lagi diiringi dengan sikap sompong dan membanggakan ras, suku atau golongan. Semua jenis apa pun dan kelebihan apa pun yang dianugerahkan Tuhan padanya, tetap memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan, dan oleh karenanya sesama manusia yang merupakan sama-sama makhluk Tuhan harus menjaga solidaritas kemanusiaan, dan tidak dibenarkan saling berperang dan saling men”teror” satu sama lainnya.

Globalisasi fenomena geopolitik baru

Sebagai fenomena baru, globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan koesistensi dengan menying-kirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat. Metos yang berkembang adalah bahwa proses globalisasi akan membuat dunia seragam. Proses globalisasi akan menghapus identitas dan jati diri. Kebudayaan lokal atau etnis akan ditelan oleh kekuatan budaya besar atau kekuatan budaya global. Anggapan atau jalan pikiran ini tidak sepenuhnya benar. Kemajuan teknologi komunikasi memang telah membuat batas-batas dan jarak menjadi hilang tak berguna. Namun demikian justru berpendapat sebaliknya, yaitu semakin kita menjadi universal, tindakan kita semakin kesukuan, dan berpikir lokal, bertindak global. Maksudnya tentu saja agar kita mengkonsentrasiikan kepada hal-hal yang bersifat etnis, yang hanya dimiliki oleh kelompok tertentu atau masyarakat itu sendiri sebagai modal pengembangan ke dunia Internasional²⁰

Pandangan Naisbitt ini jika kita kaitkan dengan peradaban Islam awal yang unik, memiliki kekuatan spiritual, dapat

²⁰John Naisbitt, *Global Paradox*, 1988.

berkembang menuju Adikuasa Dunia, setelah menaklukkan Persia dan Romawi. Di sini globalisasi menjadi bagian dari geografi politik karena di dalamnya terdapat proses pergeseran peta politik dunia. Pada abad 21 ini, Amerika Serikat merasa “terancam” oleh adanya pergeseran pengaruh peta politik dunia dan berusaha memperkuat dirinya dengan cara memperbaiki citra dirinya lalu mendiskreditkan negara lain.

Amerika Serikat terlihat di forum dunia, seolah-olah menjadi pahlawan demokrasi, tetapi pada sisi lain tidak segan-segan menuduh sebagian negara yang tidak sepandapat disebut negara anti demokrasi dan atau menyebutnya sebagai “poros setan”. Selain itu, sang Super Power juga mencoba mematahkan munculnya tokoh-tokoh dunia yang berpotensi dengan cara merusak nama baiknya dengan sebutan “teroris”. Isu penumpasan terorisme memuncak sejak peristiwa 11 September 2001 dengan melakukan gerakan agresi militer ke Afganistan. Dengan cara tersebut ia mendapatkan dua keuntungan; simpati dari warga dunia sebagai “penumpas” teroris dan dapat “mengangkangi” negara yang diagresinya sebagai penyedia sumber daya cadangan bagi kepentingan nasionalnya. Agresi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu merupakan teror keras²¹ terhadap negara-negara kecil terutama negara-negara Muslim, karena sangat berlawanan dengan kaedah-kaedah perang yang harus ditegakkan. Pembombardiran daerah sipil, daerah pemukiman penduduk dan meluluhlantakkan fasilitas umum.

Islam tidak mengenal istilah perang suci (*holy war*). Perang dilakukan jika terjadi serangan dari luar yang membahayakan eksistensi umat Islam. Perang tidak dibenarkan menyerang orang-orang yang telah tunduk kepada aturan Allah dan atau mereka yang telah mengadakan perjanjian damai.²²

²¹Doktrin perang mencakup tiga kategori; *pertama*, harus memenuhi kriteria untuk memperbaiki suatu kejahatan publik atau sebagai upaya pembelaan diri; *kedua*, harus dilakukan pada pelaku yang salah, dan bukan kepada warga sipil yang terjebak dalam suatu keadaan yang tidak mereka ciptakan. Pengeboman terhadap daerah hunian warga sipil sangat tidak dibenarkan dan *ketiga*, mengatur tentang proses mengakhiri perang. Lihat, Sri Hayati dan Ahmad Yani, *Geografi Politik*, (Bandung : Refika Aditama, 2007), h. 123-124.

²²Aturan perang dalam Islam lebih rinci lagi, yaitu : jangan berkhianat; jangan berlebih-lebihan; jangan inkar janji; jangan mencincang mayat; jangan

Perang yang mengatasnamakan penegakan Islam tetapi tidak mengikuti cara-cara Nabi Saw tidak bisa disebut jihad, apa lagi dengan kekerasan. Larangan dalam peperangan harus diindahkan, dengan dasar etika itu, Islam tidak membenarkan terorisme. Karena terorisme buka sebuah cara dalam etika perang.

Perang yang dilancarkan Amerika terhadap terorisme, memiliki motivasi tertentu. Bukti otentik adanya faktor kepentingan bahwa yang menyertai tindakan Barat dalam aksi-aksi politik dan militer yang menyebabkan timbulnya calsh antara Barat dan beberapa negara Islam adalah fenomena Perang Teluk jilid II di Irak. Dengan dalih memerangi terorisme dan atau menumbangkan kekuasaan Saddam Husein, bertujuan menguasai sumber-sumber minyak yang konon kandungannya nyaris sepadan dengan yang dipunyai oleh Arab saudi. Lebih dari itu, dengan runtuhan pemerintahan Saddam Husein di Irak, akan lebih mengukuhkan hegemoni Amerika Serikat sebagai satu-satunya adidaya di muka bumi ini berhak berbuat apa saja untuk melaksanakan kepentingan globalnya.

Bercermin dari gambaran di atas, nampaknya Indonesia harus ekstra hati-hati terhadap fenomena geopolitik baru, yaitu perang antara ideologi demokrasi melawan terorisme. Di sini terlihat bayang-bayang skenario global. Indonesia "diobok-obok", atas nama menumpas teroris, tetapi pemerintah telak melakukan teror terhadap rakyatnya sendiri. Pesantren sebagai pusat pradaban Islam yang mewariskan tradisi keilmuan, secara "membabi buta" dipahami oleh pemerintah sebagai sarang teroris. Ada stu dua ekor tikus maling padi, tetapi lumbungnya dibakar. Ironi sekali, dan sangat memilukan dan sekaligus memalukan dan merusak pencitraan Indonesia itu sendiri di pentas Internasional.

Kasus KKN semakin menjadi-jadi, perekonomian semakin terpuruk, huru hara politik, mulai dari proses pemilu sampai ke pelantikan Presiden, ditambahkeruhkan oleh persoalan terorisme. Biaya pendidikan yang melambung tinggi. Ekonomi,

membunuh anak kecil, orang tua renta dan wanita; jangan membakar pohon, menebang atau menyembelih binatang ternak kecuali untuk dimakan; jangan mengusik orang-orang yang taat kepada agama yang dianutnya (ahli kitab) yang sedang beribadah. Jika melakukan larangan dalam berperang maka mereka dianggap berdosa dan menyalahi misi perang secara Islam.

baik makro maupun mikro dikendalikan asing. Ambruknya berbagai imfrastruktur, mulai dari transfortasi, kreta, bus, pesawat, kapal laut terjadi kecelakaan demi kecelakaan, kemudian munculnya bencana alam yang tidak berkesudahan. Alih-alih menguatnya NKRI malah memunculkan pergolakan-pergolakan baru di sana sini. Hati-hati hegemoni Amerika mengintai.

Penutup

Konsep dua entitas *dâr al- Islâm* dan *dâr al- harb* dalam dunia kontemporer tidak mungkin dapat dipadukan, karena keduanya tidak memiliki eksistensi yang jelas dan pasti, dan perjanjian-perjanjian, disebabkan pengaruh politik yang ruwet dan perebutan kekuasaan yang tidak seimbang, tidak bisa dianggap sebagai tanda persetujuan antara dua atau lebih pemerintahan yang bebas dan independen. Terkait dengan kehidupan demokrasi yang terbuka, agaknya rumah Indonesia menjadi tawaran solusi dari benturan kedua entitas tersebut. Rumah Indonesia yang damai, yang aman, yang memberikan jaminan dengan konsep pluralisme demokratisnya. Islam Indonesia adalah Islam yang unik dan moderat, membawa kesejukan dan kedamaian, yang secara substantif adalah *dâr al-Islâm* yang hakiki.

Definisi geografis tentang *dâr al- Islâm* dan pembagian-pembagian internnya tidak penting lagi karena dalam Islam, hukum itu bersifat personal dan tidak teritorial. Bagian-bagian lain dari *dâr al- Islâm* kategori yang paling penting dari segi geografi, terbuka bagi Ahli Kitab (Masehi dan Yahudi) yang bisa tinggal di situ sebagai orang "yang dilindungi" atau biasa bepergian ke situ sebagai orang asing yang membawa tanda masuk. *Dâr al-harb* tidak meliputi seluruh negara yang bukan Islam yang sesungguhnya dapat juga menikmati eksistensi legitimate dan kemerdekaan yang sempurna secara *de facto* atau *de jure* atau dengan sayarat-syarat tertentu. Ciri-ciri *dâr al- harb* tidak adanya lembaga-lembaga yang menegakkan perdamaian dan keadilan, dan tidak diperlukannya hukum dan jiwa al-Qur'ân. itu adalah kawasan kekerasan, kebodohan dan kezhaliman (tirani).

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Hafidz, *Diskursus Islam Politik Spiritual*, Bogor : Al Azhar Press, 2004.254.
- Adams, Ian, *Ideologi Politik Mutakhir Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depannya*, Yogyakarta : Penerbit Qalam, 2004.
- Black, Anthoni, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, Jakarta : Serambi, 2006.
- Boisard, Marcel A., *Humanisme dalam Islam*, (terjemahan M. Rasjidi), Jakarta : Bulan Bintang, 1980.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia edisi kedua*, Jakarta : Balai Pustaka, 1995.
- Ghunaimi, Mohammad T., *The Muslim Conception of International Law and the Western Approach*, La Haye : Nijhoff, 1968.
- Hayati, Sri dan Ahmad Yani, *Geografi Politik*, Bandung : Refika Aditama, 2007.
- Hodgson, Marshall G. S., *The Venture of Islam* (Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia Masa Klasik Islam) Buku Kedua, terjemahan Mulyadhi Kartanegara, Jakarta : Paramadina, 2002.
- Jaiz, Hartono Ahmad, *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Lawrence, Bruce B., *Islam Tidak Tunggal Melepaskan Islam dari Kekerasan*, Jakarta : Serambi, 2004.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, Jakarta : Paramadina, 2000.
- Moussalli, Ahmad, *Radical Islamic Fundamentalism : The Ideological and Political Discourse of Sayyid Quthb*, Beirut : American University of Beirut, 1992.
- Naisbitt, John, *Global Paradox*, 1988
- Qaththân, Syaikh Mannâ' al-, *Iqâmah al-Muslîm fî Balad Ghair Islâmî* (Perkampungan Muslim di Negara Non-Muslim), Paris : 1993.
- Quthb, Sayyid, "Ma'alim fi al-Thariq, Cairo : Dar ash-Shuruq, 1964.

M.Sidi Ritaudin, Integritas.....

- Quthb, Sayyid, *Milestones*, Cedar Rapids, Iwoa : Unity Publishing, t.th.
- Ramadan,, Tariq, *Teologi Dialog Islam-Barat Pergumulan Muslim Eropa*, Bandung : Penerbit Mizan, 2002.
- Schuon, Frithjof, *Islam dan Filsafat Perennial*, Bandung : Mizan, 1993.

* **M. Sidi Ritaudin** adalah alumnus Program Doktor Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dosen Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung